



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 19 November 2019

Kepada :

Yth. Kepala OPD Lingkup Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat

di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 470/1091/DPPKBKPS.4/XI/2019

TENTANG

#### PELAKSANAAN GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK GERAKAN SUMBAR TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

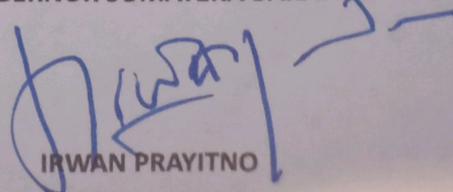
Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-627-2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Sumatera Barat, dimana salah satunya adalah Gugus Gerakan Sumatera Barat Tertib, yang terdiri dari Tertib Penggunaan Ruang Publik, Tertib Pengelolaan Pengaduan, Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Lalu Lintas, Tertib Perilaku Antri.

Untuk pelaksanaan Aksi Nyata Tertib Administrasi Kependudukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gerakan tertib Administrasi Kependudukan akan dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta keluarga, untuk memastikan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memutakhirkan data Kartu Keluarga (KK), sudah rekam dan cetak KTP, dan sudah mempunyai akta untuk semua anggota keluarga.
2. Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan juga ditujukan untuk mengukur cakupan tertib Administrasi Kependudukan ASN dan tertib Administrasi Kependudukan tamu yang berurusan dengan masing-masing OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan baik untuk tertib Administrasi Kependudukan, keamanan maupun fasilitasi yang diperlukan sekaitan dengan dokumen kependudukan tamu terkait.
3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) melakukan evaluasi pelaksanaan di masing-masing OPD Pemprov Sumbang terkait dokumen kependudukan tersebut, dengan teknis pelaksanaan yang akan disampaikan dengan surat pemberitahuan tersendiri.
4. Hasil evaluasi oleh DPPKBKPS, dilaporkan secara periodik kepada Gubernur, dan akan ditindaklanjuti dengan apresiasi dan sanksi baik kepada ASN maupun OPD terkait.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Terima kasih

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
IRWAN PRAYITNO